



Judul : Revisi UU Sisdiknas, wajib belajar 13 tahun jadi bahasan utama
Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Sisdiknas Wajib Belajar 13 Tahun Jadi Bahasan Utama

KOMISI X DPR terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Salah satu isu utama dalam pembahasan tersebut adalah perluasan cakupan pendidikan wajib belajar menjadi 13 tahun, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Anggota Komisi X DPR Juliyatmono menegaskan, revisi UU Sisdiknas harus mampu menjawab tantangan struktural pendidikan nasional dengan menempatkan wajib belajar 13 tahun sebagai fondasi kebijakan pendidikan. "Pendidikan harus dimaknai sebagai proses pembangunan manusia sejak usia dini," ujarnya, kemarin.

Dia bilang, pendidikan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan di jenjang formal, melainkan sebagai pembangunan kapasitas manusia sejak fase paling awal kehidupan. Berbagai riset global menunjukkan intervensi pendidikan pada usia dini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kemampuan kognitif, pembentukan karakter, serta kesiapan belajar anak.

Karena itu, PAUD tidak sekadar berfungsi sebagai pengasuhan, melainkan fase krusial dalam membangun dasar literasi, numerasi, disiplin sosial, dan kesiapan psikologis anak sebelum memasuki pendidikan formal. "Menjadikan PAUD sebagai bagian dari wajib belajar adalah langkah

strategis, bukan pilihan," tegas politikus Partai Golkar itu.

Juliyatmono menilai, kebijakan wajib belajar 13 tahun akan memperkuat prinsip keadilan akses dan pemerataan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan dan daerah tertinggal. Tanpa kehadiran negara sejak usia dini, ketimpangan pendidikan berpotensi terus direproduksi antar generasi.

Komisi X DPR, lanjutnya, mendorong negara hadir secara lebih tegas melalui empat langkah utama, yakni penguatan kerangka hukum wajib belajar 13 tahun yang inklusif, peningkatan dan standarisasi kualitas layanan PAUD, penjaminan pendanaan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta integrasi PAUD ke dalam ekosistem pendidikan nasional agar tidak diperlakukan sebagai sektor pinggiran.

Menurut legislator asal Jawa Tengah tersebut, negara yang serius membangun kualitas sumber daya manusia tidak menunggu kegagalan anak di jenjang berikutnya, tetapi hadir sejak awal. Oleh sebab itu, revisi UU Sisdiknas harus mencerminkan visi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia yang utuh dan berkelanjutan.

Ia berharap, revisi UU Sisdiknas menjadi momentum strategis untuk mengoreksi arah kebijakan pendidikan nasional agar lebih berorientasi pada pencegahan ketimpangan, penguatan fondasi belajar, serta pembangunan karakter bangsa. ■ TIF